

Ethiopia Bantah Lakukan Pembersihan Etnis di Tigray

ADDISABABA (IM) - Ethiopia membantah tuduhan Amerika Serikat (AS) telah melakukan pembersihan etnis di Tigray. Ethiopia menolak kritik terbaru terhadap operasi militernya di wilayah utara oleh pemerintahan baru di Washington.

Sebelumnya Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan dia ingin melihat pasukan Eritrea dan mereka yang berasal dari wilayah Amhara di Tigray diganti oleh pasukan keamanan yang akan menghormati hak asasi manusia dan tidak melakukan tindakan pembersihan etnis. "Tuduhan itu" adalah putusan yang sama sekali tidak berdasar dan palsu terhadap pemerintah Ethiopia," kata Kementerian Luar Negeri Ethiopia dalam sebuah pernyataan.

"Tidak ada selama atau setelah akhir operasi penegakan hukum utama di Tigray dapat diidentifikasi atau didefinisikan oleh standar apa pun sebagai pembersihan etnis yang disengaja dan ditargetkan terhadap siapa pun di wilayah itu," sambung pernyataan itu.

"Pemerintah Ethiopia dengan keras menentang tuduhan semacam itu," tegas pernyataan itu seperti dikutip dari Reuters, Minggu (14/3).

Kementerian Luar Negeri Ethiopia mengatakan siap bekerja dengan pakar hak asasi manusia internasional untuk

melakukan penyelidikan atas tuduhan pelanggaran hak asasi manusia. "Pemerintah Ethiopia telah menunjukkan kesiapannya untuk terlibat secara positif dan konstruktif dengan semua pemangku kepentingan regional dan internasional yang relevan dalam menanggapi tuduhan serius pelanggaran dan kejahatan hak asasi manusia," katanya.

Tentara federal Ethiopia menggulingkan bekas partai penguasa regional, Tigray People's Liberation Front (TPLF), dari ibu kota Mekelle pada November lalu setelah apa yang dikatakannya sebagai serangan mendadak terhadap pasukannya di wilayah yang berbatasan dengan Eritrea.

Pemerintah Ethiopia telah mengatakan bahwa sebagian besar pertempuran telah berhenti tetapi mengakui masih ada insiden penembakan yang tensolasi. Ethiopia dan Eritrea membantah keterlibatan pasukan Eritrea dalam pertempuran bersama pasukan Ethiopia, meskipun puluhan saksi, diplomat dan seorang jenderal Ethiopia telah melaporkan kehadiran mereka. Ribuan orang tewas setelah pertempuran itu, ratusan ribu orang teroris dari rumah mereka dan ada kekurangan makanan, air serta obat-obatan di Tigray, wilayah berpenduduk lebih dari 5 juta orang. ● gul



VAKSINASI DI WASHINGTON - AS

Warga menerima vaksin penyakit virus korona (COVID-19) di lokasi vaksinasi masal di Lumen Field Event Center di Seattle, Washington, Amerika Serikat, Sabtu (13/3).

Kim Jong-un Belum Respon Pendekatan Diplomatik Joe Biden

Selama kampanye pilpres, Biden menggambarkan Kim Jong-un sebagai "preman" dan mengatakan ia hanya akan bertemu dengannya dengan syarat bahwa diktator muda Korut itu akan setuju bahwa dia akan menurunkan kapasitas nuklirnya.

WASHINGTON (IM) - Korea Utara (Korut) belum memberi respon pendekatan diplomatik di belakang layar pemerintahan Presiden Joe Biden sejak pertengahan Februari lalu, termasuk untuk misi diplomatik Pyongyang di PBB. Hal itu diungkapkan seorang pejabat senior pemerintahan Biden.

Pengungkapan pendekatan Amerika Serikat (AS) yang sejauh ini tidak berhasil, yang belum pernah dilaporkan sebelumnya, menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana Biden akan mengatasi ketegangan yang meningkat dengan

Pyongyang terkait program senjata nuklir dan rudal balistiknya.

Ini juga menambah dimensi baru pada kunjungan diplomat dan menteri pertahanan tertinggi Amerika yang akan dilakukan minggu depan ke Korea Selatan (Korsel) dan Jepang, di mana kekhawatiran atas persenjataan nuklir Korut diharapkan menjadi agenda utama.

Pejabat senior pemerintahan Biden, yang berbicara tanpa menyebut nama, memberikan sedikit rincian tentang dorongan diplomatik. Tetapi pejabat itu mengatakan telah

ada upaya untuk mendekati pemerintah Korut melalui beberapa saluran mulai pertengahan Februari, termasuk di New York.

"Sampai saat ini, kami belum menerima tanggapan dari Pyongyang," kata pejabat itu seperti dikutip dari Reuters, Minggu (14/3).

Pemerintahan Biden sejauh ini berhati-hati dalam menjelaskan secara terbuka pendekatannya ke Korut, dengan mengatakan pihaknya melakukan tinjauan kebijakan yang komprehensif menyusul keterlibatan mantan Presiden Donald Trump yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan pemimpin Korut Kim Jong-un.

Pejabat pemerintahan Biden mengatakan tampaknya tidak ada dialog aktif antara AS dan Korut selama lebih dari setahun, termasuk di akhir pemerintahan Trump, meskipun Amerika Serikat telah melakukan banyak upaya selama waktu itu untuk terlibat

Pejabat AS tersebut menolak untuk berspekulasi tentang bagaimana kebangkitan dari Pyongyang akan berdampak pada tinjauan kebijakan pemerintahan Biden terhadap Korut, yang diharapkan akan selesai dalam beberapa minggu mendatang.

Selama kampanye pilpres, Biden menggambarkan Kim Jong-un sebagai "preman" dan mengatakan ia hanya akan bertemu dengannya dengan syarat bahwa diktator muda Korut itu akan setuju bahwa dia akan menurunkan kapasitas nuklirnya.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken telah mengulurkan kemungkinan sanksi tambahan, berkoordinasi dengan sekutu, untuk menekan Korut agar melakukan denuklirisasi.

Sanksi sejauh ini gagal meyakinkan Kim Jong-un untuk menyerahkan senjata nuklirnya.

Blinken dijadwalkan tetap di tuan rumah diskusi tetap

muka pertama antara pemerintahan senior Biden dan pejabat Tiongkok pada 18 Maret di Alaska. Pemerintahan Trump menuduh Tiongkok gagal memberlakukan sanksi terhadap Korut.

Laporan rahasia PBB menemukan bahwa Korut memelihara dan mengembangkan program rudal nuklir dan balistiknya sepanjang tahun 2020 yang melanggar sanksi internasional, membantu mendanai mereka dengan sekitar USD300 juta dicuri melalui peretasan siber.

Laporan oleh pengawas sanksi independen mengatakan Pyongyang memproduksi bahan fisil, memelihara fasilitas nuklir dan meningkatkan infrastruktur rudal balistiknya sambil terus mencari bahan dan teknologi untuk program tersebut dari luar negeri.

Misi Korut di Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak segera menanggapi permintaan komentar. ● tom

Ratusan Ditangkap, Polisi Rusia Gerebek Forum Oposisi

MOSKOW (IM) - Polisi Rusia menahan sekitar 200 orang yang berpartisipasi dalam forum anggota independen dewan kota di Moskow. Tindakan ini dilakukan di tengah tindakan keras multi-cabang terhadap perbedaan pendapat oleh otoritas Rusia.

Polisi muncul di pertemuan itu tidak lama setelah dibuka di sebuah hotel Moskow, mengatakan semua yang hadir akan ditahan karena mengambil bagian dalam acara yang diselenggarakan oleh organisasi yang "tidak diinginkan". Seorang petugas polisi yang memimpin penggerebekan mengatakan orang-orang yang ditahan akan dibawa ke kantor polisi dan dituntut melakukan pelanggaran administratif.

Polisi Moskow mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka bergerak untuk menghentikan pertemuan karena melanggar pembatasan virus Corona karena banyak peserta yang tidak memakai masker. Mereka mengatakan sekitar 200 peserta ditahan, beberapa dari mereka diduga anggota organisasi yang "tidak diinginkan".

OVD-Info, sebuah kelompok independen yang memantau pengangkapan dan penindasan politik, memposting daftar lebih dari 180 orang yang ditahan. Mereka termasuk Ilya Yashin, seorang politisi oposisi yang memimpin salah satu distrik Moskow; mantan Walikota Yekaterinburg Yevgeny Roizman; dan anggota dewan kota Moskow Yulia Galyamina.

Polisi mulai melepaskan para tahanan setelah menyerahkan panggilan pengadilan kepada mereka karena berpartisipasi dalam kegiatan organisasi yang "tidak diinginkan", yang merupakan pelanggaran yang dapat dihukum denda. Tidak jelas berapa banyak yang tetap ditahan polisi pada Sabtu malam.

"Tujuan mereka adalah untuk menakut-nakuti orang agar tidak terlibat dalam politik," kata Andrei Pivovarov, seorang politisi yang membantu mengatur forum tersebut, dalam sebuah video yang direkam saat dia berada di dalam mobil polisi seperti dikutip dari Sydney Morning Herald, Minggu (14/3).

Pivovarov telah memainkan peran utama dalam Open Russia, sebuah kelompok yang didanai oleh

taipan Rusia yang diasingkan, Mikhail Khodorkovsky. Khodorkovsky pindah ke London setelah menghabiskan 10 tahun penjara di Rusia atas tuduhan yang secara luas dipandang sebagai balas dendam politik karena menantang pemerintahan Presiden Vladimir Putin.

Undang-undang tahun 2015 memperkenalkan hukuman pidana untuk keanggotaan dalam organisasi yang "tidak diinginkan". Pemerintah telah menggunakan undang-undang tersebut untuk melarang sekitar 30 kelompok, termasuk Rusia Terbuka.

Undang-undang sebelumnya mewajibkan organisasi non-pemerintah yang menerima dana asing dan terlibat dalam aktivitas yang secara bebas digambarkan sebagai politik untuk mendaftar sebagai "agen asing".

Undang-undang tersebut telah banyak dikritik sebagai bagian dari upaya Kremlin untuk membungkam perbedaan pendapat, tetapi pihak berwenang Rusia menggambarkannya sebagai politik untuk mendaftar sebagai "agen asing".

Undang-undang tersebut telah banyak dikritik sebagai bagian dari upaya Kremlin untuk membungkam perbedaan pendapat, tetapi pihak berwenang Rusia menggambarkannya sebagai respons yang sesuai atas dugaan upaya Barat untuk merusak negara.

Tindakan keras polisi pada forum hari Sabtu menyusul penangkapan dan pemenjaraan pemimpin oposisi Rusia, Alexei Navalny.

Musuh politik Presiden Rusia Vladimir Putin yang paling gigih itu ditangkap pada 17 Januari setelah kembali dari Jerman, di mana ia menghabiskan lima bulan untuk memulihkan diri dari keracunan zat saraf yang ia salahkan kepada Kremlin. Otoritas Rusia telah menolak tuduhan tersebut.

Bulan lalu, Navalny dijatuhi hukuman 2,5 tahun penjara karena melanggar ketentuan masa percobaannya saat menjalani pemulihan di Jerman - tuduhan yang ia anggap sebagai balas dendam Kremlin. Penangkapan dan pemenjaraannya memicu gelombang protes di seluruh Rusia, yang ditanggapi oleh pihak berwenang dengan tindakan keras besar-besaran.

Pemerintah Rusia telah meningkatkan tindakan kerasnya terhadap oposisi menjelang pemilihan parlemen yang ditetapkan pada September karena popularitas partai utama yang didukung Kremlin, Rusia Bersatu, telah menyusut. ● gul

Meghan Dilaporkan Siap Maju Jadi Capres AS

LONDON (IM) - Meghan Markle dilaporkan akan menggunakan kehebohan yang ditimbulkannya saat wawancara dengan Oprah Winfrey untuk memulai karir politiknya. Tidak tanggung-tanggung, Markle membidik kursi di Gedung Putih, The Daily Mail melaporkan, mengutip seorang tokoh senior Partai Buruh yang tidak disebutkan namanya.

Seorang tokoh senior Partai Buruh mengatakan kepada media Inggris itu bahwa Markle membuat jaringan di antara para senior Partai Demokrat dengan maksud untuk membangun kampanye dan tim penggalangan dana untuk mencalonkan diri sebagai Presiden Amerika Serikat (AS).

"Jaringan partai Blairite, internasionalis, dan Demokrat sedang membicarakan tentang ambisi politik Meghan dan calon pendukungnya," seperti dikutip dari The Daily Mail, Minggu (14/3).

Sumber itu menambahkan anggapan bahwa Duchess sedang mengincar pemilu 2024, ketika Presiden Joe Biden akan berusia 82 tahun dan memutuskan apakah dia ingin mencalonkan diri untuk

masa jabatan kedua.

Terkait laporan tersebut, sumber yang dekat dengan Duchess of Sussex menolak berkomentar, tetapi pasangan itu merahasiakan pilihan politik mereka.

Sedangkan pakar konstitusi AS menjawab bahwa dia harus melepaskan gelarnya jika dia ingin memegang jabatan publik di Amerika, karena itu akan melanggar sumpah setia AS.

Selama pemilu Amerika Serikat (AS) tahun lalu, mereka melancarkan serangan terselubung terhadap Donald Trump dengan mendesak para pemilih untuk 'menolak pidato kebencian', yang oleh juru bicara pasangan itu digambarkan sebagai 'seruan untuk kesopanan'. Trump sendiri kemudian membalasnya dengan menyatakan bahwa dia 'bukan penggemar' Meghan.

Istana Buckingham telah mencoba menjauhkan Keluarga Kerajaan untuk membuat pernyataan selama pemilu AS dengan mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa "Duke tidak bekerja sebagai anggota keluarga Kerajaan" dan menggambarkan komentarnya dibuat dalam kapasitas pribadi.

Tahun lalu, seorang teman Duchess of Sussex mengatakan kepada majalah Vanity Fair bahwa salah satu alasan dia tidak melepaskan kewarganegaraan Amerika-nya ketika dia menikah dengan Keluarga Kerajaan adalah agar dia tetap membuka opsi untuk memasuki politik Washington.

Jika dia berhasil mencapai Gedung Putih, Meghan akan menjadi wanita pertama yang menjadi Presiden AS di mana Hillary Clinton gagal empat tahun lalu dan penguhuni Oval Office non-kulit putih kedua setelah Barack Obama.

Dia juga akan mengikuti jejak Presiden Ronald Reagan, yang merupakan aktor Hollywood selama empat dekade sebelum beralih ke politik. Selama kampanye tahun 2020, Duchess berbicara kepada When All Women Vote Couch Party, organisasi yang didirikan oleh Michelle Obama untuk mendorong partisipasi dalam pemilihan.

Teman-teman Meghan sebelumnya mendorong spekulasi tentang ambisi politiknya - menggambarkan kebangkitannya dari awal yang sederhana sebagai 'pervujudan impian Amerika'. ● ans



PERINGATAN BERAKHIRNYA MUSIM DINGIN

Warga menyaksikan patung Lady Maslenitsa yang terbakar saat perayaan Maslenitsa, yang juga dikenal sebagai "Pancake Week", yang merupakan liburan pagan yang memperingati berakhirnya musim dingin, di kota Yuryev-Polsky di daerah Vladimir, Rusia, Sabtu (13/3).

Presiden Argentina Diserang Pendemo yang Marah soal Kebakaran Hutan

BUENOS AIRES (IM) - Puluhan pengunjuk rasa menendang dan melemparkan batu ke sebuah minibus yang membawa Presiden Argentina Alberto Fernandez pada hari Sabtu (13/3). Saat itu presiden sedang melakukan kunjungan ke daerah bekas kebakaran hutan di negara itu.

Seperitu dilansir AFP, Minggu (14/3) dalam tayangan televisi terlihat Fernandez harus berlindung di balik pengawalnya saat kerumunan demonstran mendorong ke arahnya dan delegasinya, ketika dia meninggalkan pusat komunitas di kota Lago Puelo di wilayah Patagonia Selatan.

Menurut rekaman yang diarsipkan oleh TN dan surat kabar Clarin, terlihat para pengunjuk rasa kemudian menghentikan bus yang membawa presiden. Tak hanya itu, mereka juga memukul, menendang dan melemparkan batu hingga memecahkan jendela kendaraan.

Fernandez tak terlalu menanggapi kekerasan yang dialaminya dan mengatakan hal itu hanya dilakukan segelintir orang. "Saya yakin bahwa kekerasan ini tidak dilakukan oleh orang-orang Chubut atau oleh mereka yang mendiami Argentina yang kita cintai," tulisnya, merujuk pada provinsi yang menggilingi kota itu.

Dengan pengamanan yang tidak terlalu ketat, sejumlah

orang berhasil menghentikan bus presiden dan kendaraan lain dalam rombongan itu selama beberapa menit. Mereka bahkan melemparkan tubuhnya ke kap kendaraan Fernandez. Setelah kerumunan bubar, beberapa kendaraan lain mengular di antara kerumunan dan maju dengan bus kepresidenan. Clarin melaporkan bahwa para demonstran marah atas proyek pertambangan di provinsi Chubut, yang merupakan bagian dari Patagonia, dan kepada gubernur provinsi.

Menurut para pejabat setempat, kebakaran yang melanda Patagonia selama berhari-hari telah merenggut satu nyawa, sementara 11 orang lainnya dilaporkan hilang. Puluhan orang telah dievakuasi dari jalur kobaran api, dan sekitar 200 rumah hancur. Beberapa kota juga kini dibiarkan tanpa air atau listrik.

Menurut laporan media setempat, kebakaran, yang diduga pihak berwenang dimulai dengan sengaja awal pekan ini, telah mencapai beberapa kota di dekat kaki pegunungan Andes, dan telah menghancurkan sekitar 15.000 hektar hutan. Ditambahkan sesosok mayat warga pedesaan yang hangus, yang dilaporkan hilang sejak Selasa, ditemukan di dekat kota El Maiten. ● ans



MEMORIAL CLAPHAM COMMON BANDSTAND

Seorang perempuan membawa bunga ke lokasi memorial Clapham Common Bandstand, menyusul penculikan dan pembunuhan Sarah Everard, di London, Britain, Sabtu (13/3).

Mantan Presiden Bolivia Ditahan Ditahan Atas Tuduhan Kudeta

LA PAZ (IM) - Mantan Presiden sementara Bolivia, Jeanine Anez, berada di balik jeruji besi pada hari Sabtu (13/3) usai dituduh berpartisipasi dalam upaya kudeta tahun 2019 untuk merebut kekuasaan.

Seperitu dilansir Reuters, Minggu (14/3) menurut surat perintah penangkapan yang diposting Anez di media sosial, dirinya beserta sejumlah menteri dan pejabat keamanan menghadapi dakwaan terorisme, hasutan, dan konspirasi atas dugaan kudeta terhadap pemerintah sosialis Bolivia.

Diketahui, Anez memimpin Bolivia kurang dari setahun setelah Presiden Evo Morales meninggalkan jabatannya usai klaim kecurangan pemilihan umum dan protes dengan kekerasan memuncak di negara itu.

Beberapa jam setelah penggerebekan fajar di rumah Anez di pusat kota Trinidad, dirinya terlihat berada di balik jeruji besi di sel tahanan wanita di La Paz. Ia menunggui sidang pengadilan yang akan berlangsung dalam waktu 24 jam usai penangkapannya.

Anez mengaku sebagai korban "penganiayaan politik yang menyimpang" dan mengatakan bahwa dia harus mendapatkan kekebalan sebagai mantan presiden. Dalam surat kepada Organisasi Negara-negara Amerika dan Uni Eropa, Anez meminta misi pengamat untuk mengevaluasi penangkapan dirinya, dan mantan menteri energi dan kehukumannya.

"Ini benar-benar penghinaan, mereka menuduh kami sebagai kaki tangan kudeta," kata Anez kepada televisi lokal ketika dia tiba dengan pesawat militer di bandara La Paz di bawah pengawasan polisi yang ketat.

"Tidak ada tuduhan kebenaran pun dalam tuduhan itu. Ini adalah intimidasi politik. Tidak

ada kudeta. Saya hanya ikut serta dalam suksesi konstitusional," imbuhnya.

Anez mengambil alih kekuasaan pada akhir 2019 setelah Morales mengundurkan diri di tengah protes kekerasan yang meluas terhadap pemerintahannya. Protes itu digambarkan karena menuduh Morales melakukan kecurangan untuk memenangkan pemilihan umum. Protes terjadi lantaran Morales melakukan pencalonan dirinya untuk masa jabatan keempat kalinya, yang belum pernah terjadi sebelumnya dan dianggap tidak konstitusional. Sedikitnya 33 orang tewas dalam kekerasan setelah pemilu, 30 di antaranya setelah Anez menjabat.

Menteri Pemerintah Eduardo del Castillo mengonfirmasi pada hari Sabtu (13/3) bahwa Kantor Kejaksaan telah menahan Anez karena terlibat dalam "kudeta di negara kita." Dia menegaskan proses hukum akan diikuti. "Tidak ada penganiayaan politik di pihak kami di sini, dan kami tidak takut siapa pun yang berpikir berbeda," katanya dalam konferensi pers.

Menteri Kehakiman Ivan Lima mengatakan kepada TV pemerintah bahwa penyelidikan terhadap Anez terkait dengan saat dia menjadi senator oposisi, bukan saat menjadi presiden sementara. "Karena itu, hak konstitusional tidak berlaku," ujarnya.

Julie Chung, asisten sekretaris Departemen Luar Negeri AS untuk Biro Urusan Bagian Barat, mendesak "teman dan tetangga kita di Bolivia" untuk menggalakan hak-hak sipil dan menjamin proses hukum tahanan. "Orang Amerika dan banyak orang di seluruh Amerika tahu dari pengalaman sulit tentang perlunya menjaga dan terus memperbaiki aturan demokratis, oleh, dan untuk rakyat," tweetnya. ● ans